

BAB 5

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

1.1.1 Simpulan Umum

FPSH HAM Jawa Barat merupakan satu-satunya organisasi non formal yang menghimpun seluruh FPSH HAM tingkat kabupaten/kota, duta-duta hukum dan HAM atau organisasi sejenisnya di daerah Provinsi Jawa Barat. FPSH HAM Jawa Barat menjadi salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang selalu membina diri agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadi pelopor dalam mewujudkan pelajar yang sadar hukum dan taat hukum. Dalam menjalankan tugasnya FPSH HAM Jawa Barat mempunyai program-program utama yang bertujuan untuk mewujudkan pelajar Jawa Barat yang sadar hukum dan HAM, mencetak pelajar sadar hukum dan HAM yang berkarakter tinggi, mengarahkan para pelajar agar dapat memaknai kehidupan dengan taat pada hukum dan aturan yang berlaku pada kehidupan manusia, memiliki adab dan taat hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka dalam menjalankan berbagai tugasnya FPSH HAM Jawa Barat membina dan menjalin komunikasi dengan berbagai komponen pemangku kepentingan, dengan instansi yang tergabung dalam tim pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat atau lainnya dengan mengkolaborasi program kegiatan yang relevan dengan FPSH HAM Jawa Barat. Oleh karena itu pembinaan kesadaran hukum dan HAM terhadap para pelajar yang dilakukan oleh FPSH HAM Jawa Barat harus mendapat dukungan dari semua pihak, agar pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia tersebut bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

1.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan pada hasil analisa dari wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi dan partisipasi maka peneliti akan memamparkan kesimpulan khusus berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di buat yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan non formal termasuk FPSH HAM Jawa Barat, program-program kegiatan yang dimiliki cukup efektif untuk dijadikan sebagai sarana pembelajaran PKn atau disebut sebagai *citizenship education* dalam melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM. FPSH HAM mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hukum dan HAM para pelajar di Jawa Barat. Program-program kegiatan yang dilakukan senantiasa selalu terkait dengan pembinaan kesadaran hukum dan HAM yang

berdasarkan pada landasan filosofis dari organisasi tersebut, seperti Anggaran Dasar Organisasi sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan program strategis kepada tanah tumpah darah Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejauh ini walaupun FPSH HAM Jawa Barat baru diakui secara legal berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/Kep. 1341-Disdik/2018, tetapi telah cukup memberikan kontribusi akan pentingnya memiliki keasadaran hukum dan HAM yang tinggi.

2. Dalam menjalankan perannya sebagai wadah pendidikan non formal di luar sekolah dan sebagai wadah pembinaan serta pengembangan karakter pelajar dan potensi anggota. FPSH HAM Jawa Barat menyelenggarakan tugas pokok pembinaan kesadaran hukum dan HAM bagi anggota, pengurus dan pelajar di Jawa Barat. Maka dalam menyusun program kerja mengacu pada nilai-nilai budaya bangsa dalam membentuk daya saing karakter, program-program FPSH HAM Jawa Barat di bagi menjadi ke dalam beberapa bidang-bidang yang berkewajiban memimpin dan mengarahkan terhadap kebijakan dan strategi dalam mengelola dan melaksanakan jalannya program bidang kebijaksanaan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun program-program dari FPSH HAM Jawa Barat sebagai upaya membina kesadaran hukum dan HAM terbagi menjadi 10 program, dimana program-program tersebut sudah sesuai dengan kajian ruang lingkup PKN dalam Permendikbud No. 69 Tahun 2013.
3. Dalam melaksanakan program-program kegiatannya FPSH HAM Jawa Barat menghadapi berbagai kendala yaitu timbulnya hambatan-hambatan baik secara internal dan eksternal. Dimana luasnya wilayah Jawa Barat menjadikan adanya sedikit hambatan untuk bertemu dan berkomunikasi antara pengurus FPSH HAM Jawa Barat dengan FPSH HAM tingkat Kabupaten/Kota, terbatasnya dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan misinformasi dan miskomunikasi, FPSH HAM Jawa Barat merupakan organisasi *bottom up* sehingga masih belum banyak dikenal orang, kendala komunikasi dengan pihak eksternal terkait program kerja yang akan dibuat, masalah legalitas forum di tingkat Kabupaten/Kota, masalah kewenangan dalam mengembangkan jangkauan sasaran pembinaan kesadaran hukum dan HAM, masalah sumber daya manusia (SDM) karena ada sebagian orang yang merasa tidak tertarik dengan organisasi, adanya keanggotan FPSH

HAM yang kurang aktif, permasalahan anggaran dana dalam melaksanakan program-program kegiatan. Tentunya harus ada upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik antara pengurus, pembina FPSH HAM Jawa Barat dengan FPSH HAM tingkat Kabupaten/Kota, terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, melakukan jalur advokasi, rutin mengadakan pertemuan, memberikan delegasi kepada pengurus yang aktif, memberikan arahan dari pembina terhadap para pengurus, memberikan motivasi kepada para pengurus, melakukan koordinasi dan komunikasi, memiliki optimisme dalam melaksanakan berbagai program-program kegiatan.

1.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa Pengembangan Kesadaran Hukum dan hak HAM dalam PKn yang diterapkan melalui organisasi FPSH HAM Jawa Barat, dimana FPSH HAM Jawa Barat dijadikan sebagai sarana pembelajaran PKn dalam pendidikan non formal atau disebut sebagai *citizenship education* mempunyai dampak yang cukup positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan HAM para pelajar di Jawa Barat. Maka dalam hal ini implikasi dari penelitian yang dilakukan harus terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. PKn merupakan mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum pendidikan, dimana pembelajarannya selain dilakukan dalam pendidikan formal bisa juga dilakukan dalam pendidikan non formal. PKn dalam pendidikan non formal dalam artian luas disebut sebagai *citizenship education*, baik secara formal ataupun non formal tetap fokus utamanya adalah pembentukan warga negara, agar dapat memahami dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembelajaran PKn dalam hal ini diterapkan dalam organisasi yaitu FPSH HAM Jawa Barat yang berperan sebagai *citizenship education* dalam melaksanakan pengembangan kesadaran hukum dan HAM. FPSH HAM Jawa Barat melakukan pembinaan dan mengarahkan peserta didik untuk mewujudkan proses kesadaran hukum pada jenjang sekolah menengah atas (sederajat), dimana ini merupakan salah satu wadah aktifitas dalam hal kesadaran hukum dan akan menjadi bekal saat para pelajar turun bermasyarakat dan dapat

- menyebarkan virus positif untuk mengajak pelajar lain agar tidak melakukan berbagai perilaku yang beresiko serta melanggar hukum dan hak asasi manusia.
2. FPSH HAM Jawa Barat berperan sebagai *citizenship education*, dimana bentuk kegiatan pengembangan kesadaran hukum dan HAM yang dilakukan adalah menyelenggarakan tugas pokok pembinaan kesadaran hukum dan hak HAM bagi anggota, pengurus dan pelajar di Jawa Barat. Guna menumbuhkan harapan sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Dimana program-program kegiatan yang dilaksanakan menggunakan pendekatan perkembangan moral, analisis nilai, klarifikasi nilai melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam diri para pelajar. Materi yang disampaikan meliputi materi Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah sesuai dengan kajian ruang lingkup PKn dalam Permendikbud No.69 Tahun 2013, kehidupan sosial, peraturan hukum yang berlaku serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan.
 3. Walaupun berbagai hambatan dihadapi oleh FPSH HAM Jawa Barat saat menyelenggarakan tugas pokok pembinaan kesadaran Hukum dan HAM terhadap para pelajar, tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tetap memiliki optimisme bahwa FPSH HAM Jawa Barat cukup efektif untuk dijadikan sebagai wahana pembelajaran PKn dalam pendidikan non formal yang berperan sebagai *citizenship education*. Hal ini terlihat dari adanya pembentukan FPSH HAM, Deklarasi pelajar sadar hukum dan HAM, Pembinaan kesadaran hukum dan HAM dan Penobatan Duta Hukum dan HAM di 27 Kabupaten/Kota dan SMA/SMK/MA/SMALB Sederajat di Daerah Provinsi Jawa Barat. Dampak tersebut tentunya akan memberikan *output* yang positif yaitu semakin meningkatnya kesadaran hukum dan hak asasi manusia para pelajar di Jawa Barat.

1.3 Rekomendasi

1.3.1 Bagi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat

- a. FPSH HAM Jawa Barat harus bisa melakukan revitalisasi kembali terhadap FPSH HAM di tingkat Kabupaten/Kota yang masih belum aktif dalam melaksanakan program-program kegiatan terkait dengan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

- b. FPSH HAM Jawa Barat harus bisa melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan sesama organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya dalam mengembangkan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.
- c. FPSH HAM Jawa Barat harus bisa lebih inovatif lagi yaitu dalam mengembangkan program-program kerja, khususnya yang terkait dengan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.
- d. FPSH HAM Jawa Barat harus bisa merangkul semua pelajar dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, dimana pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada pelajar di tingkat SMA sederajat.
- e. FPSH HAM Jawa Barat kedepannya harus bisa lebih melibatkan lagi guru PKn dalam melaksanakan program-program kegiatannya, terutama yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

1.3.2 Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Diselenggarakannya penelitian ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa melihat bahwa permasalahan mengenai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia merupakan permasalahan krusial bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa memberikannya baik secara moril dan materiil terhadap organisasi-organisasi yang mempunyai potensi dan kontribusi positif bagi kemajuan generasi muda dan masa depan bangsa khususnya bagi organisasi FPSH HAM Jawa Barat karena berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.3.3 Bagi Praktisi Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Memberikan masukan terhadap pengajar PKn, dimana pembelajaran PKn mengenai kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang dikembangkan melalui pendidikan non formal cukup efektif diberikan kepada peserta didik. Dikarenakan peserta didik bisa terlibat secara langsung dalam melaksanakan program-program kegiatan, sehingga peserta didik bisa mendapatkan pemahaman lebih mudah mengenai hukum dan hak asasi manusia yang ada dalam pembelajaran PKn.
- b. Mendorong untuk dilakukannya kolaboratif antara pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam pembelajaran PKn untuk kedepannya, tidak hanya mengenai kesadaran hukum dan hak asasi manusia semata. Tetapi bisa mengembangkan kajian ruang lingkup lainnya, sehingga peserta didik bisa

mendapatkan pengetahuan materi dalam pendidikan formal dan bisa mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam pendidikan non formal.

1.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, selalu senantiasa mencari informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi wawasan dan pengetahuan mengenai peran organisasi yang dijadikan sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan/ *citizenship education* khususnya yang terkait dengan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Peneliti selanjutnya bisa menemukan penelitian yang masih terkait dengan pendidikan kewarganegaraan melalui FPSH HAM Jawa Barat yaitu mengenai pendidikan karakter dan bela negara, dikarenakan selain memiliki berbagai program kegiatan mengenai kesadaran hukum dan HAM. FPSH HAM Jawa Barat juga memiliki program kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan karakter dan bela negara.